

Model Integrasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Meningkatkan Etos dan Produktivitas Kerja Pelayanan Publik

*Integration Model of Religious Values
in Improving the Ethos and Productivity of Public Service Work*

Kurnali Sobandi

Pengawas Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi

Email : kurnali.sobandi@gmail.com

Abstract

The more an employee is able to integrate themselves from being an employee with heavy and numerous primary duties and functions with their limitations (anthropocentric), and only thinking about their own personal welfare (ego-centric), towards becoming an employee who depends on the Almighty God who has power and greatness (humanism-theocentric), the more they will undergo a metamorphosis into a humanist-transcendental employee, an employee who always needs and thinks deeply about the greatness of Allah the Almighty in all aspects of their work.

The efforts that can be made to achieve this goal through this article is that each employee is expected to know three things: First, to affirm the ideal self of the theocentric employee who has an understanding of the relationship between religion and state, Islam as the ideal religion, work in Islam, and public service in the view of Islam. Second, to realize the fact that the employee is anthropocentric, who has a gap in understanding of Islam and difficulties in becoming a worker. Third, the offer of a solution to overcome the gap between the ideal and the fact by integrating the anthropocentric employee self with the humanist-theocentric employee self towards the humanist-profetic-transcendental employee self by carrying out the primary duties and functions of the employee in accordance with Islamic ethics will produce a humanist-profetic-transcendental employee.

Keywords: Integration Model, Religious Values, Public Service Work

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang berkualitas tentunya harus didukung oleh keberadaan pekerja yang profesional dan handal dengan didasarkan pada pribadi-pribadi pekerja yang berhati ikhlas. Guna membentuk pribadi pekerja yang profesional dan handal dengan didasarkan pada keikhlasan hati yang tinggi dalam melakukan pelayanan publik maka perlu dilakukan pengembangan pribadi mereka dengan pembangunan diri secara holistik. Pendekatan holistik semakin banyak diperkenalkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti dunia pendidikan, sains, ekonomi, filafat, sosiologi dan kesehatan. Pendekatan holistik menyentuh diri manusia secara menyeluruh, baik dari sudut emosi, mental maupun aspek kerohanian individu. Pendekatan holistik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap diri individu dan masyarakat itu sendiri. Dalam bidang motivasi atau perkembangan individu, misalnya, pendekatan holistik dapat mengembangkan potensi diri

manusia dan mengoptimalkan kekuatan diri insan (*human power*) dalam kehidupan mereka setiap hari.

Pembangunan diri secara holistik (*holistic self improvement*) harus menjadi pola pengembangan diri bagi para pekerja. Pendekatan holistik dengan menetapkan kerja ikhlas amalkan tugas menekankan pada upaya pengembangan diri pekerja melalui pendekatan holistik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik guna peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Oleh karena itu, proses pembinaan pekerja dilakukan secara berkesinambungan dengan fungsionalisasi nilai-nilai keagamaan diri pribadi pekerja dengan mengedepankan pembinaan aspek pencerdasan spiritualitas pekerja, hal ini dapat mengubah dan menumbuhkan semangat bekerja para pekerja di lingkungan kerjanya dengan penuh keikhlasan.

Seorang pekerja ketika mulai diangkat untuk bertugas dalam jabatannya perlu mengucapkan suatu sumpah atau janji. Sumpah atau janji ini disebut sebagai sumpah atau janji pekerjai, yang harus diucapkan dan dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang ada. Pengambilan sumpah atau janji pekerja merupakan salah satu upaya pembinaan pekerja sebagai pekerja dan abdi masyarakat. Tujuan dari pengambilan sumpah atau janji pekerja ini adalah agar para pekerja ini mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur, berdaya guna dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya serta di dalam mendukung usaha pemerintah guna mendorong terciptanya *good governance*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul "*Fungsionalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Meningkatkan Etos dan Produktivitas Kerja Pelayann Publik*"

I. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode studi pustaka. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang terkait dengan pekerja. Informasi tentang pekerja itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik (www.transiskom.com).

Jenis penulisan artikel ini yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik deskriptif analisis (Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 2019), ekspositori (A. Chaeda, 2005), dan persuasif (Suparno dan Muhamad Yunus, 2010). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan buku saku pekerja ini adalah pendekatan normatif perenialis (dalil-dali Al-Qur'an dan Al-Sunnah) teologis (dalil Tauhid, sufistik dalil Akhlak Tasawuf), yurisprudensi (dalil Fiqh), dan yuridis formal (dalil Undang-undang, Peraturan Negara, dan lainnya) (Abuddin Nata, 2009)

Alur artikel ini terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu: Bagian pertama diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, metode dan alur penulisan, dan tujuan dan manfaat artikel. Bagian kedua, menyuguhkan idealita diri pekerja teo sentris Bagian ketiga mengungkap fakta diri sebagai pekerja antroppo sentries. Bagian Keempat, bagaimana

mengintegrasikan tugas pokok dan fungsi pekerja sebagai pekerja humanisme *antropo-sentris* melalui diri pekerja humanisme teo-sentris menuju pekerja yang *humanisme-profetik transendental*. Bagian kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. (Abuddin Nata, 2009).

Penulis berharap kehadiran artikel ini akan menjadi penggugah hati dan pemberi inspirasi untuk senantiasa menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan “Sumpah” saat pelantikan sebagai pekerja atau “Sumpah Jabatan” yang telah diikrarkan yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (YME).

Tujuan khusus penulisan ini adalah sebagai berikut: Tujuan pertama, memberikan pemahaman kepada para pekerja tentang adanya relasi antara agama dan Negara, idealita ajaran Islam, kerjamenurut Islam dan pandangan agama Islam terhadap pelayanan publik. Tujuan kedua, menggugah hati dan menggerakkan pekerja untuk melakukan kerja ikhlas amalkan tugas dalam rangka melakukan integrasi diri pekerja dari antroposentris melalui diri pekerja teosentris bertransformasi menuju diri pekerja yang humanism profetik transendental dalam meningkatkan etos dan produktivitas kerja pelayanan publik.

Manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan ini adalah adanya perubahan paradigma berpikir dan sikap/perilaku para pekerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dari orientasi pelaksanaan yang bersandar pada keterbatasan manusia dengan bersumber pada filsafat dan idiologi bersifat materialisme, rasionalisme, dan empirisme yang besandar pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik semata; atau hanya bersifat antroposentris menuju pekerja humanisme profetik transendental dengan kerja ikhlas amalkan tugas dalam melakukan transformasi diri pekerja dalam meningkatkan etos dan produktivitas kerja membangun negeri.

II. PEMBAHASAN

1. Relasi Agama dan Negara

Perbincangan hubungan Islam dan negara adalah wacana klasik sejak berabad-abad lalu, namun hangat dibicarakan kembali bersamaan dengan kebangkitan umat Islam seantero dunia Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya Islam adalah satu sistem kepercayaan di mana agama mempunyai kaitan erat dengan politik (Dale F. Eickelman, dan James Piscatori, 1998)

Walaupun Islam dalam Al-Qur’an, dan sunnah Rasulullah sebagai sumber otoritatif secara eksplisit tidak memberikan statemen yang jelas tentang negara. Namun demikian secara implisit Allah berfirman dalam Al-Qur’an yang dapat dijadikan indikasi sebagai prinsip dalam bernegara seperti dalam Q.S Al-Maidah ayat 49, dan Q.S Al-Nisa, ayat 105, juga dalam Q.S Al-syu’ra ayat 38. Begitu pula khulafaurrasyidin secara de facto walaupun mereka membentuk tatanan ketatanegaraan, namun tidak bisa dijadikan representasi contoh negara Islam. Menurut Munawir Sadzali, minimal ada 3 (tiga) aliran dalam ketatanegaraan menurut Islam, yaitu: aliran pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap, tokohnya Abdul A’la Maududy menulis buku yang mengupas tuntas sistem ketatanegaraan dalam Islam. Aliran kedua berdasarkan teori sekuler ala Barat yang menolak pernyataan *al-dien al-dawlah* agama adalah negara, dalam pandangan ini tidak ada hubungan antara agama dan negara. Aliran ketiga merupakan aliran moderat yang menengahi dari kedua

pendapat di atas. Aliran ini menolak yang pertama dan tidak sependapat dengan yang kedua. Aliran ini menyatakan bahwa di dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, namun demikian terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan berbangsa, dan bernegara (Muanwir Sdzaki, 1993)

2. Idealita Ajaran Islam

Islam adalah agama universal sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107. Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 3. Islam adalah agama yang benar, sebagaimana Allah ta'ala juga berfirman dalam Q.S. Ali Imran ayat 19. Islam adalah sebagai agama yang lengkap, komplit, komprehensif, dan holistik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 208.

Idealita Islam diakui oleh para pakar, di antaranya; Islam menurut Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari segala aspeknya agama yang lengkap. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (habl min Allah), melalui ibadah ritual, melainkan mengatur hubungan manusia dengan manusia (habl min al-nas) mencakup berbagai aspek kehidupan manusia: sosial, politik, ketatanegaraan, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya (Harun Nasution, 1999). Islam menurut Hamami Zadah, dalam bukunya Diskursus Politik Islam. Islam adalah agama dan negara (Khamami Zada, 2004). Islam menurut Muhammad Ibn Abd Hafidz Suwaid bahwa Islam bukan hanya sekedar agama tetapi juga agama keluarga (Hamim Thohari, 2010). Selanjutnya menurut Abuddin Nata bahwa Islam secara fungsional berfungsi sebagai faktor kreatif, inovatif, sublimatif, dan integratif (Abuddin Nata, 2011). Namun demikian, idealita keislaman kita perlu dibuktikan dengan fakta pengamalan keislaman kita.

3. Kerja Menurut Islam

Bekerja adalah fitrah dan menjadi ciri manusia yang didasarkan oleh iman, Islam bahkan meninggikan kepribadian seorang khalifah di bumi. Istilah kerja dalam Islam dapat diucapkan dengan kata *al-'Amal*, *al-Ibtigha*, dan *al-Kasbu*. Banyak ayat Al-Qur'an dan al-Hadits yang memberikan motivasi untuk mencari nafkah, di antaranya; Q.S. al-Ankabut ayat 69, Q.S. al-Taubat ayat 105, Q.S. ar ayat 39, Q.S. al-Jumu'ah ayat 10, Q.S. al-Mulk ayat 15. Demikian pula banyak hadits Nabi SAW yang memberikan motivasi bekerja adalah di antaranya hadits yang artinya: "Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu". Hadits Nabi SAW yang artinya: "Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan isterimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu" (Hamim Thohari, 2010).

4. Pelayanan Publik dalam Pandangan Islam

a. Arti Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik dalam pandangan penulis memiliki arti pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan kondisi empowering yang dialami masyarakat (Thoha Miftah, 2001). Pengabdian kepada masyarakat menurut Abuddin Nata adalah mendarmabaktikan, mencurahkan, memperhatikan, memikirkan, dan mengupayakan segala sesuatu untuk diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan sifat kebutuhannya pengabdian masyarakat sifat ada yang bersifat fisik maupun non fisik, dan berdasarkan jangka waktunya pengabdian masyarakat berjangka pendek, menengah, dan panjang (Abuddin Nata, 2011).

Berdasarkan yuridis formal bahwa pelayanan publik pada hakekatnya adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik UU No 25 tahun 2009).

b. Jenis Pelayanan Publik

Adapun jenis pelayanan publik meliputi: Layanan fisik: pelayanan berbentuk penyediaan barang (gedung sekolah, jalan, jembatan, gedung rumah sakit, dan lain-lain); Layanan non fisik: pelayanan jasa atau tidak berbentuk barang (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain); Layanan administratif pelayanan yang bersifat pengaturan atau legalitas (KTP, perijinan, akte kelahiran, surat-surat penting dan lain sebagainya). Pelayanan publik adalah salah satu di antara upaya pemenuhan naluri kebutuhan manusia, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 14 (Abuddin Nata, 2011)

c. Alasan Dibutuhkan Pelayanan Publik

Setidaknya ada 4 (empat) alasan diperlukannya pelayanan publik, yaitu;

1) Alasan pertama

Terdapat sejumlah alasan, di antaranya: Melayani di samping sebagai tujuan, juga sebagai sarana atau alat membantu manusia agar sukses dalam kehidupannya meraih kebutuhan baik fisik maupun non fisik (PP Pendayagunaan Aparatur Negara th 2006). Hal ini sesuai dengan anjuran firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Abuddin Nata, 2011).

2) Alasan kedua

Sarana prasarana yang dibangun dan dikembangkan serta penyiapan pekerja oleh pemerintah adalah dibiayai oleh uang masyarakat. Maka sepantasnya pemerintah menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas juga dapat dilihat dari seberapa besar dimensi kualitas pelayanan *tangibility* (sarana prasarana)

dapat diwujudkan oleh organisasi penyelenggaraan pelayanan publik, dengan demikian, berupaya untuk mendekatkan jarak yang ada antara organisasi pemerintah dengan harapan dan keinginan masyarakat Pasolong, Harbani, 2011). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nisa ayat 86 yang artinya: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.”

3) Alasan ketiga

Masyarakat sebagai sumber inspirasi dan tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan dalam arti yang seluas-luasnya (Abunddin Nata, 2011). Maka berbagai aspek pengembangan pelayanan harus bertolak dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 14 yang artinya: “Dijadikan indah (pandangan) manusia kecintaan kepada apa saja yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)”.

4) Alasan keempat

Menurut ajaran Islam, bahwa pada setiap manusia ada hak untuk Tuhan, untuk dirinya, dan untuk masyarakat (Mushaf AlQuran) Karenanya perlu adanya harmonisasi hubungan dengan Tuhan, dirinya dan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Tahrim ayat 6 dan yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. Al-Tahrim 66:6)

FAKTA DIRI SEBAGAI PEKERJA ANTROPO SENTRIS

Menurut Azyumadi Azra setidaknya ada 3 (tiga) faktor penyebab fakta keterbatasan dalam memahami keislaman, yaitu: Pertama, manusia umumnya mengandalkan pemikiran filsafat dan idiologi bersifat materialisme, rasionalisme, dan empirisme yang besandar pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik semata; atau hanya bersifat antroposentris berpusat pada manusia belaka. Mereka hanya mengandalkan kemampuan manusia yang sebenarnya serba terbatas dan kekurangan, tidak bergantung pada teo-sentris berpusat pada Allah SWT. Kedua, masih ada pemikiran keislaman dikotomis, yakni Islam hanya berurusan dengan keyakinan agama, ritualitas, dan ilmu-ilmu agama. Di luar itu dianggap bukan wilayah Islam, seperti kesehatan, pendidikan, politik, pemerintahan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, kehidupan Islam semakin semarak dengan ditandai banyak masjid, majlis ta’lim, calon jama’ah haji meningkat, Al-Qur’an semakin banyak dicetak, jama’ah shalat tarawih dan jama’ah i’tikap semakin meningkat. Namun ketika dihadapkan pada kenyataan semakin meningkat pula tindak pidana korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), konflik horizontal, main hakim sendiri dan sebagainya (Azyumardi dalam Abuddin Nata, 2011).

Masih ada yang memahami Islam dengan tekstual, tidak secara kontekstual dengan menampakkan wajah Islam menakutkan (radikal), diskriminatif (intoleran) bahkan mudah mengkafirkan sesama muslim (takfiri). Padahal Imam Al-Qurafy di dalam kitabnya *Anwar al-Buruq fi Anwa'i al-Furuq* menjelaskan bahwa: *Al-Jumud 'Al al-Manqulat Abadan Dhalalun fi al-Din wa Jahlun Bi Maqashidi 'Ulama'i al-Muslimin wa al-Salaf al-Madhin* yang artinya: Pemahaman secara tekstual apa adanya adalah sesat/ menyesatkan dan bodoh/ membodohi.

Menjadi seorang pekerja adalah sulit tidak mudah dengan persyaratan dan persaingan yang cukup ketat. Namun demikian, yang berat lagi setelah menjadi pekerja dengan cukup banyak dan berat tugas pokok dan fungsi yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan bangsa di dunia bahkan kepada Tuhan YME di akhirat. Sosok pekerja yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan negara adalah sosok pekerja yang tidak memperlihatkan perilaku "ego-sentris" yang hanya ingin menang sendiri, merasa benar sendiri dan ingin memperkaya diri sendiri, bukan pula sosok pekerja yang "antroposentris" yaitu yang hanya memiliki paradigma sempit terhadap lingkungan kerjanya sendiri tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan secara luas, dari perbuatannya/ kebijakannya yang menyimpang dari aturan. Akan tetapi, sosok pekerja yang "eko-sentris", itu yang didambakan oleh masyarakat, bangsa dan Negara. Sosok pekerja yang "eko-sentris" senantiasa memperhatikan dampak dari perbuatannya/ kebijakannya terhadap ekosistem secara luas.

TRANSFORMASI DIRI PEKERJA ANTROPO SENTRIS MELALUI INTEGRASI TEO SENTRIS MENUJU CITRA DIRI PEKERJA HUMANISME-PROFETIK TRANSENDENTAL

1. Tawaran Solusi Atas Kesenjangan Idealita dan Fakta

Menghadapi berbagai kesenjangan tersebut di atas, maka harus ada upaya kesadaran manusia dengan menyadari kelemahan kemampuan manusia (antropo-sentris) dengan cara selalu mengintegrasikan kepada kekuatan Allah SWT (teo-sentris) sehingga manusia yang serba terbatas dengan mengintegrasikan nilai-nilai prophetic-transendental yang dibangun dari kepercayaan mendalam kepada Tuhan yang dipadukan akan menghasilkan manusia yang berketuhanan (humanism teo sentris). Manusia kian menyadari membutuhkan berbagai konsep ekonomi, politik, budaya hukum, dan sebagainya yang berwawasan prophetic-transendental. Sebut saja salah satunya masalah kerja. Sering kita memisahkan kerja dengan Allah. Seolah-olah kerja adalah urusan dunia bukan ibadah. Seolah-olah kerja adalah tidak berhubungan dengan pahala dan agama.

2. Transformasi Diri Pekerja Antropo Sentis melalui Integrasi Teo Sentris Menuju Citra Diri Pekerja Humanisme-Profetik Transendental

Bagian ini, penulis mengajak diri pribadi penulis dan para pekerja lainnya untuk melakukan proses pengintegrasian ilmu pengetahuan dengan ilmu keislaman sebagai dasar pengamalan beragama Islam. Proses pengintegrasian yang dimaksud dalam hal ini adalah mengintegrasikan ilmu pelayanan publik dengan ilmu keislaman. Proses penintegrasian dalam dunia akademik disebut *shifting paradigm*. *Shifting Paradigm* di dalam teori ilmu sosial yaitu teori yang menyatakan bahwa semua ilmu pengetahuan adalah mengalami

perubahan, pergeseran, perumusan kembali, penyempurnaan, nasikh mansukh serta penyempurnaan rancang bangun epistemologi keilmuan. Maka upaya untuk melakukan integrasi ilmu agama dan umum secara utuh bukanlah sesuatu yang tabu (Amin Abdullah, 1996).

Penulis pada bagian ini pun mengajak diri pribadi penulis dan para pekerja umumnya untuk melakukan kontemplasi dengan cara menyadari bahwa diri pribadi pekerja ini sebagai manusia makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan (*antropo-sentris*). Namun demikian, walaupun menyadari akan kelemahannya namun tetap dituntut untuk terus mengejar kesempurnaan sehingga menuju manusia sebagai pekerja yang sempurna yang sesuai dengan kesempurnaan Tuhannya (humanisme-teosentris).

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai *prophetic-transendental* yang dibangun dari kepercayaan mendalam kepada Tuhan yang dipadukan akan menghasilkan manusia yang berketuhanan (*humanism-teocentris*). Manusia kian menyadari membutuhkan berbagai konsep ekonomi, politik, budaya hukum, dan sebagainya yang berwawasan *prophetic-transendental*.

Pekerja yang telah menyadari akan keterbatasannya di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang berat dan banyak dengan menggantungkan, menghubungkan segala aspek pekerjaannya kepada Allah maka dengan tidak memisahkan kerja dengan Allah, maka akan merubah paradigma bahwa kerja adalah urusan bukan sekedar urusan dunia belaka, namun juga urusan akhirat, ibadah, diberikan pahala dan ditempatkan di surga Allah Tuhan Yang Maha Esa (YME). Transformasi pekerja sebagai manusia yang memiliki keterbatasan (*antropo-sentris*) menuju pekerja surge sebagai manusia yang sempurna sesuai kesempurnaan Tuhannya (*humanisme-teosentris*) menjadi -pekerja-manusia yang lemah namun memiliki kepercayaan mendalam kepada Allah Tuhan YME (*humanisme-prophetic transendental*) dengan cara bekerja sesuai dengan etika Islam.

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi pekerja dengan sesuai etika Islam akan menghasilkan pekerja yang humanisme profetik transendental. Etika bekerja dalam Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pertama, bekerja niat ibadah kepada Allah. Said Agil Al-Munawar mengatakan bahwa semangat Al-Qur'an adalah semangat kemajuan dan peradaban, karena kemajuan dan peradaban tidak datang begitu saja tanpa aktifitas, kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh serta etos kerja yang tinggi. Oleh sebab itu dalam perspektif agama bahwa beraktifitas, berusaha, disiplin dalam bekerja, dan bersungguh-sungguh dalam berusaha mencari rizki adalah termasuk bagian dari ibadah (Said Aqil Husein Munawar, 2005). Sebagaimana dalam Q.S. Al-Dzaariyaat ayat 56 yang artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku". Banyak hadits yang memberikan motivasi bekerja, jerih payah bahkan meninggal dalam bekerja adalah pahala yang sangat besar dengan diampuni dosa, shadaqah dan amal yang utama (Hamim Thohari, 2010). Sebelum memulai usaha, maka penuhlah kewajiban beribadah kepada Allah, lalu berdo'a kepadanya. Karena kesuksesan suatu usaha tidak terjadi karena semata-mata usaha manusia, melainkan unsur kekuatan Tuhan YME. Dengan demikian, manusia tidak dapat terus berusaha mencari rizki dengan melupakan Tuhannya (Hamim Thohari, 2010).

Kedua, bekerja dengan ikhlas dan amanah. Bekerja ikhlas dengan niat hanya menghendaki keridhaan Allah SWT, artinya dalam melaksanakan pekerjaan tidak ada yang melatarbelakangi kecuali karena mengharap ridha Allah SWT. Memandang tugasnya sebagai pengabdian kepada-Nya. Bekerja adalah sebuah panggilan yang mulia untuk melaksanakan amanat yang memang harusnya dilakukan (Eko Jalu Santoso, 2012). sebagaimana dalam Q.S. Al-Nisaa' ayat 58 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Ketiga, bekerja dengan tekun, sungguh-sungguh, dinamis, terus menerus, kembangkan diri menuju kemajuan sesuai dengan keahlian, dan melakukan kegiatan yang positif (Mushaf Alquran Kemenag, 2012). Keahlian meningkatkan kualitas. Kualitas akan menentukan kepuasan sebagaimana Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya "Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan dengan tekun". (Riwayat Al-Baihaqi).

Keempat, bekerja dengan semangat kebersamaan. Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan (Chapra, 2001). sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang artinya: "dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan penceroohan."

Kelima, bekerja dengan tujuan kebahagiaan umat manusia. Islam adalah agama membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam juga merupakan agama yang peduli kepada nasib manusia. Nasib manusia di dunia berhubungan dengan pandangan mereka tentang kebahagiaan hidup. Pandangan manusia bahwa hidup itu sulit yang ada dalam satu kebudayaan akan mendorong masyarakatnya melakukan segala usaha untuk memadamkan hidup guna meraih kebahagiaan sejati, sehingga kehidupan mereka tidak berkembang (Hamim Ilyas, 2007). Sebagaimana dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107 yang artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Tidak ada kepentingan individu dalam mencapai tujuan institusi. Kepentingan pribadi tunduk kepada kepentingan umum".

Keenam, bekerja dengan disertai bersyukur atas karunia Tuhan YME. Bersyukur karena mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan rizki yang halal, baik, memakan yang halal dan baik, serta bertawakal kepada tuhan YME baik melalui hati, lidah, dan perbuatan

(Mushaf Alquran , 2012) Sebagaimana dalam Q.S. Ibrahim ayat 7 yang artinya: Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambahkan nikmat-Ku kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih”.

Kedelapan, menjauhkan dari dengki, khianat, tamak, dan putus asa. Karena Tuhan YME telah mengatur rezeki, melapangkan dan menyempitkan kepada yang Dia kehendaki dengan tanpa memandang apapun, baik orang yang beriman maupun tidak beriman, sehingga jika dilapangkan jangan lupa diri, khianat dan tamak dan sebaliknya jika disempitkan jangan dengki, dan putus asa.

Kesembilan, menghindari dari praktik makan riba dan korupsi dengan cara bathil (tidak seimbang), penipuan dan penggelapan, suap menyuap, mencuri, dan berjudi. Komisi pemberantasan korupsi dengan mencermati substansi UU No 31 Tahun 1999, dan UU No 20 Tahun 2001 membagi tindak pidana korupsi ke dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, keajahtan korupsi itu sendiri. Kedua, Kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi. Akan tetapi, karena berkaitan dengan korupsi, maka juga dianggap juga sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam kelompok pertama dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni tindakan: merugikan keuangan atau perekonomian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan dan gratifikasi.

III. SIMPULAN

Berdasarkan uraian beberapa bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa semakin seseorang pekerja mampu mengintegrasikan dirinya sebagai pekerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berat dan banyak dengan keterbatasannya (antropo-sentris), dan hanya memikirkan kesejahteraan pribadi sendiri (ego-sentris) menuju diri sebagai pekerja yang bergantung kepada Tuhan YME yang memiliki kekuasaan dan kebesaran (humanisme-teosentris) maka akan mengalami metamorfosa menjadi pekerja yang humanisme-transendental, seorang pekerja yang senantiasa membutuhkan dan berpikir mendalam atas kebesaran Allah Tuhan YME dalam segala bidang pekerjaannya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk sampai pada tujuan tersebut melalui artikel ini adalah bahwa setiap pekerja diharapkan mengetahui 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, meneguhkan idealita diri pekerja teosentris yang memiliki pemahaman adanya relasi agama dan negara, Islam agama yang ideal, kerja dalam Islam, dan pelayanan publik dalam pandangan Islam. Kedua, menyadari akan fakta diri pekerja bersifat antroposentris yang memiliki kesenjangan pemahaman terhadap keislaman dan kesulitan menjadi pekerja. Ketiga, tawaran solusi mengatasi kesenjangan antara idealita dan fakta dengan mengintegrasikan diri pekerja antroposentris dengan diri pekerja humanisme teosentris menuju diri pekerja humanisme profetik transendental dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pekerja dengan sesuai etika Islam akan menghasilkan pekerja yang humanisme profetik transendental.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf (terj.) Ahmad Abdul Majid, *Trias Politika Dalam Islam*. Singapur: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner, Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Politik, Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ahmad A. Sofyan, dan M. Royhan Majid, *Gagasan Cak Nun Tentang Negara dan Islam*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003.
- Ahmad bin Muhammad ‘Alī al-Fayūmī al-Muqrī, *Miṣbāh al-Munīr*. Libanon: Maktabah Lubanan, 1987.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Al-Washilah dan A. Chaedar, *Pokoknya Menulis*. Bandung: PT. Kiblat Buku Utama, 2005.
- Amie Primarni Khairunnas, *Pendidikan Holistik Format Baru Pendidikan Islam Membentuk Karakter Paripurna*. Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima, 2013.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dale F. Eickelman, dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Eko Jalu Santoso, *Good Ethos: 7 Etos Kerja Terbaik dan Mulia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Fathurrahma Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hamim Tohari, dkk. (terj.), *Cara Nabi Mendidik Anak*, Muhammad Ibn Abd Hafidz Suwaid, *Manhaj al-Tarbawiyah al-Islamiyah Li al-Thifl*. Jakarta Timur: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2010.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1*. Yogyakarta: UII Press.
- Hermeneia, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 6, Nomor 2, Juli-Desember 2007
- Hifdzil Alim, dkk., *Jihad Nahdlatul ‘Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2017.
- <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>. Diakses pada Sabtu, 16/1/2021 Pukul 10.35
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat, (Tafsir Al-Qur’an Tematik, Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2012.
- Khamami Zada, Arif R. Arafah, *Diskursus politik Islam*. Jakarta: LSIP, 2004.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik, Jilid 2*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mahmud Yunus bahwa kerja diucapkan dengan kata: عمل artinya kerja. Lihat dalam Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya, 1990), 281.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Musa Al-Hasani Al-Maqdisi Ben Alami Zadah Faydullah, *Fath Al-Rahman Li Thalib Ayat Al-Qur’an*. Maqdis: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2012.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan ketiga. Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/26/M.Pan/05/2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetensi Atar Kabupaten/Kota.
- Rosidin, *Inspirasi Kultum dan Khutbah: Pendekatan al-Qur’an dan Hadis*. Tangerang: Tira Smart, 2018
- Said Agil Husein Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Sayid Sabiq (Terj.) Zainuddin, dkk., *Islam Dipandang dari Segi Rohani, Moral, Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sayid Sabiq, *Unsur-unsur Kekuatan dalam Islam*. Surabaya: Toko Kitab Nabhan, 1981.
- Suparno dan Muhamad Yunus, *Keterampilan Dasar Menulis*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik.
- القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، كتاب الفروق (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ج 1

